

PARTISIPASI PEMUDA SEBAGAI MASYARAKAT PUBLIK DI KABUPATEN CIANJUR DALAM MENGATASI PATOLOGI BIROKRASI DALAM RANGKA MENUJU GOOD GOVERNANCE

Hamirul

hrul@ymail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah pelayanan publik yang belum baik di kabupaten cianjur dan bertujuan untuk mengetahui keterlibatan dan partisipasi pemuda di kabupaten Cianjur dalam pelayanan publik. Dengan menggunakan metode Studi kasus dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data indepth interview dengan jumlah infoman sebanyak 107 orang ordinary informan dan 1 orang key informan yang bertempat tinggal di Cianjur kota, Cibeber, Sukagara, Pagelaran, dan Cibinong. Dari data hasil penelitian pemuda di kabupaten cianjur belum dilibatkan dalam memantau pelayanan publik yang ada di kabupaten Cianjur dan masih tidak transparansi serta waktu dalam proses kepengurusan serta biaya yang tidak jelas yang akan berakibat pada belum terciptanya Good Governance di kabupaten Cianjur. Dengan keterlibatan para pemuda di Kabupaten Cianjur walau hanya dalam bentuk partisipasi diharapkan dapat meminimalisir patologi birokrasi dalam pelayanan publik sehingga terwujudnya *good governance*.

Kata Kunci: partisipasi pemuda, pelayanan publik, patologi birokrasi, good governance

PENDAHULUAN

Kondisi masyarakat yang semakin kritis dalam era reformasi sekarang menuntut pemda untuk mengelola pelayanan publik secara lebih transparan, partisipatif agar pelayanan menjadi lebih akuntabel.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah serta Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang

pelayanan publik yang keduanya terkait dengan kebijakan mengenai kebijakan otonomi daerah yang di dalamnya termasuk pengelolaan pelayanan publik yang dimana pemerintah daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pemerintah daerah memiliki tanggung jawab akan kemajuan daerah setempat serta mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.

Dalam pelaksanaan tanggung jawab yang dimilikinya tersebut, maka muncul beberapa permasalahan dalam implementasinya, seperti sistem kerja yang saat ini dilaksanakan oleh pemerintah berlandaskan pada birokrasi yang kaku. Sehingga terjadi interaksi yang kompleks antara lembaga-lembaga negara, masyarakat, dan dunia usaha dengan pemerintah karena proses yang panjang, lambat dan rumit. Kondisi ini terjadi pada saat pengurusan berbagai perijinan yang membutuhkan waktu yang panjang dan biaya yang mahal. Serta ketidakpastian dalam ketepatan dan kecepatan dalam proses pelayanannya.

Birokrasi yang kaku tersebut mengakibatkan tidak efisien dan efektifnya kinerja aparat pemerintah dalam menjalankan kegiatan pemerintahan kewenangan dalam mengatur urusan pemerintah sendiri juga berkaitan dengan pengambilan keputusan atas pengadaan pelayanan publik. Maka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah itu sendiri. Akan tetapi pada kenyataannya berbagai keluhan dari masyarakat menjadi suatu hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Berbagai keluhan atas pelayanan publik ini dapat kita lihat pada data tahunan Komisi Ombudsman Republik Indonesia. Data keluhan masyarakat indonesia tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 1
Substansi Laporan Keluhan Masyarakat Tahun 2010

No	Substansi Laporan	Persentase
1	Penundaan Berlarut	50,19%
2	Penyalahgunaan Wewenang	17,74%

3	Berpihak	10,15%
4	Penyimpangan Prosedur	7,7%
5	Tidak Kompeten	4,65%
6	Permintaan Uang, Barang dan Jasa	3,98%
7	Tidak Patut	2,85%
8	Tidak Memberikan Pelayanan	2,66%

Sumber: Laporan Tahunan Ombudsman Republik Indonesia tahun 2010

Berdasarkan data pada tabel diatas, mayoritas mengeluh terhadap penundaan yang larut, hal ini menandakan bahwa proses kerja pemerintahan sangat lambat dan membutuhkan waktu yang lama. Keadaan ini mencerminkan kurang efektifnya proses kerja aparat pemerintah. Oleh sebab itu adanya tuntutan pelayanan publik yang dapat memenuhi kepentingan bersama, dan terfasilitasinya partisipasi masyarakat terhadap proses kebijakan pemerintah, serta efektivitas kerja pemerintah menjadi sangat penting dan butuh perhatian pemerintah. Karena pada kenyataannya kualitas pelayanan publik masih butuh perbaikan dan peningkatan dalam kualitas pelayanannya.

Permasalahan lain yaitu adanya tuntutan transparansi dari pihak pemerintah terkait dengan pengelolaan tatanan pemerintahan. Dengan adanya keterbukaan maka arus informasi dapat terlaksana secara seimbang yaitu antara pemerintah dengan masyarakat. sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengetahui seluruh informasi terkait dengan keputusan kepentingan publik secara aktif. Dengan demikian, maka partisipasi masyarakat juga dapat terjalin dan aspirasi masyarakat dapat dengan cepat tersampaikan serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat. Permasalahan terkait dengan transparansi lainnya yaitu dengan adanya peristiwa-peristiwa Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang akhir-akhir ini di *blow up* oleh pemberitaan dalam berbagai macam media informasi yang ada. Hal demikian memperlihatkan bahwa tidak adanya transparansi dari pihak pemerintah terkait pengelolaan keuangan daerah dan mencerminkan kondisi tatanan pemerintah yang tidak baik.

Permasalahan-permasalahan dalam implementasi otonomi daerah yang telah dipaparkan, mencerminkan lemahnya akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat, kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah masih kurang baik dan bahkan permasalahan tersebut dapat mempengaruhi

citra dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sebagai akibatnya *bad governance* atau tata kelola yang buruk lebih mencuat ke permukaan dan menjadi wacana di masyarakat. permasalahan ini juga mencerminkan bahwa secara nyata tata kelola pemerintah yang baik pada dasarnya tidak terlaksana dengan baik atau dengan kata lain *bad governance* yang terjadi.

Adanya permasalahan tersebut juga mengharuskan pemerintah untuk melakukan upaya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk itu perlu adanya “*setting*” baik pada tataran sistem, tataran institusi maupun tataran individu untuk berorientasi kepada pengedeapan proses *good governance* dalam pengelolaan pelayanan publik.

Semakin dituntutnya pemerintah untuk melaksanakan tatanan pemerintahannya dengan baik dan peningkatan kualitas pelayanan publik, hal tersebut menjadi pendorong pelaksanaan *good governance* dan peran dan partisipasi pemuda sangat dibutuhkan dikarenakan kaum pemuda yang akan memegang tongkat estafet pemerintahan negeri ini akan sangat mempunyai kontribusi yang besar dalam menjalankan pemerintahan dalam menuju *good governance*.

Pelayanan publik yang dilakukan oleh kabupaten Cianjur masih dirasakan kurang maksimal dan perlu adanya perbaikan-perbaikan. Hal ini dapat kita lihat dari hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Depdagri) mengenai hasil evaluasi kinerja pemerintah Kabupaten/ Kota Tahun 2011 sebagai berikut.

Tabel 2
Hasil Evaluasi Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2011

No	Kabupaten/Kota	Kriteria
1	Kabupaten Aceh Barat	D
2	Kabupaten Aceh Barat Daya	D
3	Kabupaten Aceh Jaya	D
4	Kabupaten Aceh Selatan	D
5	Kabupaten Bangka Tengah	D
6	Kabupaten Bau- Bau	D
7	Kabupaten Bekasi	D
8	Kabupaten Belitung	D
9	Kabupaten Belitung Timur	D
10	Kabupaten Bojonegoro	D

11	Kabupaten Cianjur	D
12	Kabupaten Jayapura	D
13	Kabupaten Kuningan	D
14	Kabupaten Kupang	D
15	Kabupaten Sigi	D

Sumber: kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa kinerja pemerintah kabupaten Cianjur termasuk kategori D yang artinya bahwa pengelolaan dalam pemerintahannya masih kurang baik.

Adanya *local "local voice"* dan *"local choice"* merupakan bagian dari proses pemerintahan daerah dalam rangka menciptakan dukungan masyarakat dalam pelayanan publik pola pemerintahan yang tradisional yang bertumpu pada sektor publik semata-mata dalam penyediaan partisipasi serta tidak mampu lagi untuk menciptakan partisipasi masyarakat secara sukarela. Kurangnya penciptaan *good governance* dalam pengelolaan pelayanan publik akan berakibat:

1. Ketidak berdayaan masyarakat (*citizen dis-empowerment*).
2. Kurangnya kemauan untuk berpartisipasi (*Lack of will to participate*)
3. Bertambahnya rasa apatis masyarakat pada pemerintahan.
4. Tersisihnya masyarakat dari proses pemerintahan.
5. Didominasi agenda kebijakan dan pemerintahan oleh sekelompok elite yang berkuasa.
6. Makin dominannya pemerintahan dalam pembuatan kebijakan dan pelaksanaannya.
7. Korupsi
8. Kurangnya akuntabilitas dan transparansi.
9. Kurang tanggapnya pemerintahan terhadap masalah-masalah yang dihadapi.

Dari tataran permasalahan diatas menimbulkan kebutuhan yang mendesak untuk merubah konsep pemerintahan yang pola tradisional menuju konsep pemerintahan yang bersifat partisipatif dan penulis membuat rumusan masalah mengenai bagaimana partisipasi pemuda

dikabupaten Cianjur dalam mengatasi Patologi Birokrasi demi terwujudnya *good governance*?

TINJAUAN PUSTAKA

Referensi **Hamirul** dengan judul "Patologi Birokrasi dalam pelayanan publik studi perilaku birokrasi di kantor pertanahan kabupaten cianjur "Penelitian ini bermula dari kedatangan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rudi Chrisnandi yang menyatakan bahwa pelayanan publik di kabupaten Cianjur masih jauh dari harapan, namun yang paling menjadi sorotan beliau adalah kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur masih banyaknya keluhan masyarakat. berdasarkan masalah diatas, maka peneliti mencoba meneliti untuk mengetahui patologi birokrasi yang diperkirakan yang menjadi buruknya pelayanan yang disebabkan oleh Perilaku Birokrasi, sehingga dapat melakukan pengobatan atau terapi atas perilaku birokrasi yang menyebabkan terjadinya Patologi Birokrasi.

Pada penelitian ini menggunakan metode *Mix Method* Triangulasi konkuren dengan 28 responden pengguna jasa layanan dan dihasilkan beberapa patologi yang diderita antara lain; tidak memberikan pelayanan yang cepat, cermat sekaligus ramah, imbalan jasa yang diminta tidak sesuai dengan yang seharusnya, pelayanan standar minimum, ketidakadilan, masih ada jarak antara pegawai dan pengguna layanan, bertindak sewenang-wenang, mempersulit, tidak cermat, tidak memberikan informasi kepastian biaya serta waktu (tidak transparansi) dalam penyelesaian dalam hal penyelesaian sertifikat yang diminta oleh pemohon. Dengan diketahuinya patologi, maka dapat dilakukan terapi serta berbagai strategi pelayanan yang dapat meminimalisir

PENGETERIAN PARTISIPASI

Banyak ahli memberikan pengertian mengenai konsep partisipasi. Bila dilihat dari asal katanya, kata partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris "participation" yang berarti

Pengertian tentang partisipasi yang dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi (2001:201-202), menyatakan bahwa,

“Partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya”.

Sementara itu H.A.R. Tilaar (2009:287), mengungkapkan partisipasi adalah

“Sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom –up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakat”

Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Astuti (2011:61-63) membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. Dan keempat, partisipasi dalam evaluasi,

Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumberdaya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan.

Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari *output*, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program.

Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan suatu individu atau kelompok dalam pencapaian tujuan dan adanya pembagian kewenangan atau tanggung jawab bersama.

Menurut Oakley (1991:9), memberikan pemahaman tentang konsep partisipasi dengan mengelompokkan kedalam tiga pengertian pokok, yaitu partisipasi sebagai kontribusi; partisipasi sebagai organisasi; dan partisipasi sebagai pemberdayaan.

Dengan landasan teori Oakley, disusun definisi konseptual variabel partisipasi masyarakat adalah keterlibatan langsung masyarakat dalam penanganan masalah kebersihan lingkungan yang meliputi kontribusi masyarakat, pengorganisasian masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dalam penanganan masalah kebersihan lingkungan. Dari definisi konseptual Oakley (1991:9) diperoleh 3 (tiga) dimensi kajian yakni:

Dimensi kontribusi masyarakat dijabarkan menjadi indikator-indikator: kontribusi pemikiran, kontribusi dana, kontribusi tenaga dan kontribusi sarana. Dimensi pengorganisasian masyarakat dijabarkan menjadi indikator: model pengorganisasian, struktur pengorganisasian, unsur-unsur pengorganisasian, dan fungsi pengorganisasian. Dimensi pemberdayaan masyarakat dijabarkan menjadi indikator-indikator: peran masyarakat, aksi masyarakat, motivasi masyarakat dan tanggung jawab masyarakat

Dimensi-Dimensi Patologi Birokrasi

Fenomena kehidupan manusia sebagai anggota birokrasi senantiasa bereaksi dan berinteraksi dari berbagai aspek kegiatan, tentunya bertujuan untuk meraih sesuatu jenjang kedudukan yang dimiliki oleh setiap birokrasi. Jenjang jabatan yang tertinggi dalam sebuah birokrasi merupakan suatu hal yang senantiasa didampakan setiap manusia yang tergolong dalam dalam anggota birokrasi.

Istilah patologi berasal dari ilmu kedokteran yang mengkaji mengenai penyakit yang melekat pada organ manusia, sehingga menyebabkan tidak berfungsinya organ tersebut sehingga menjadikan istilah patologi sebagai metafora, patologi birokrasi dalam uraian ini tentunya difahami sebagai kajian dalam konteks Administrasi Publik yang diarahkan untuk menelusuri secara faktual dan teoritik berbagai penyakit yang melekat dalam tubuh birokrasi pemerintah, sehingga birokrasi tersebut mengalami disfungsi.

Menurut Siagian (1994:35)

Agar seluruh birokrasi pemerintahan negara mampu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin timbul, baik yang sifatnya politis, ekonomi, sosio-kultural, dan teknologikal, berbagai penyakit yang mungkin sudah dideritanya atau mengancam akan menyerangnya, perlu diidentifikasi untuk kemudian dicarikan terapi pengobatannya yang paling efektif. Harus diakui bahwa tidak ada birokrasi yang sama sekali bebas dari berbagai patologi birokrasi. Sebaliknya tidak ada birokrasi yang menderita semua penyakit birokrasi sekaligus.

Pada teori diatas dikatakan bahwa keberadaan birokrasi yang tidak dapat menghadapi berbagai tantangan akan menyebabkan terjadinya patologi didalamnya yang mungkin disebabkan dinamika masalah politik, ekonomi, sosial budaya maupun teknologi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Siagian (1994: 36-145), mengidentifikasi berbagai patologi birokrasi yang dikategorikan ke dalam lima kelompok, yaitu:

- 1) Patologi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial para pejabat di lingkungan birokrasi.
- 2) Patologi yang disebabkan karena kurangnya atau rendahnya pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional.
- 3) Patologi yang timbul karena tindakan para aparat birokrasi yang melanggar norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku para birokrat yang bersifat disfungsional atau negatif.

- 5) Patologi yang merupakan akibat situasi internal dalam berbagai instansi dalam lingkungan pemerintahan.

Ciri-Ciri Good Governance

Dalam dokumen kebijakan *United Nation Development Programme* (UNDP) dalam Sumarto (2003:3) lebih jauh menyebutkan ciri-ciri *good Governance* yaitu:

- 1) Mengikutsertakan semua, transparansi dan bertanggung jawab, efektif dan adil.
- 2) Menjamin adanya supremasi hukum
- 3) Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat.
- 4) Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis saat ini adalah pemerintahan yang menekankan pada pentingnya membangun proses pengambilan keputusan publik yang sensitif terhadap suara-suara komunitas. Yang artinya, proses pengambilan keputusan bersifat hirarki berubah menjadi pengambilan keputusan dengan adil seluruh *stakeholder*.

Prinsip-Prinsip Good Governance

Negara dengan birokrasi pemerintahan di tuntutan untuk merubah pola pelayanan diri birokratis elitis menjadi birokrasi populis. Dimana sektor swasta sebagai pengelola sumber daya yang ada. Penerapan cita *good governance* pada akhirnya mensyaratkan keterlibatan organisasi kemasyarakatan sebagai kekuatan penyeimbang negara.

Namun cita *good governance* kini sudah menjadi bagian sangat serius dalam wacana pengembangan paradigma birokrasi dan pembangunan kedepan. Karena peranan implementasi dari prinsip *good governance* adalah untuk memberikan mekanisme dan pedoman dalam memberikan keseimbangan bagi para *stakeholders* dalam memenuhi kepentingannya masing-masing. Dari berbagai hasil yang dikaji Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam Dede Rosyada (2000:182) menyimpulkan ada sembilan aspek fundamental dalam perwujudan *good governance*, yaitu:

1. Partisipasi (*participation*)

Partisipasi antara masyarakat khususnya orang tua terhadap anak-anak mereka dalam proses pendidikan sangatlah dibutuhkan. Karena tanpa partisipasi orang tua, pendidik (guru) ataupun supervisor tidak akan mampu bisa mengatasinya. Apalagi melihat dunia sekarang yang semakin rusak yang mana akan membawa pengaruh terhadap anak-anak mereka jika tidak ada pengawasan dari orang tua mereka.

2. Penegakkan hukum (*rule of law*)

Alam pelaksanaan tidak mungkin dapat berjalan dengan kondusif apabila tidak ada sebuah hukum atau peraturan yang ditegakkan dalam penyelenggaraannya. Aturan-aturan itu berikut sanksinya guna meningkatkan komitmen dari semua pihak untuk mematuhi. Aturan-aturan tersebut dibuat tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan, melainkan untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan fungsi-fungsi pendidikan dengan seoptimal mungkin.

3. Transparansi (*Transparency*)

Persoalan pada saat ini adalah kurangnya ketrebukaan supervisor kepada para staf-stafnya atas segala hal yang terjadi, dimana salah satu dapat menimbulkan percekocokan antara satu pihak dengan pihak lain, sebab manajemen kurang transparan. Apalagi harus lebih transparan diberbagai aspek baik bidang kebijakan, baik dibidang keuangan ataupun bidang-bidang lainnya untuk memajukan kualitas dalam pendidikan.

4. Responsif (*Responsiveness*)

Salah satu untuk menuju cita *good governance* adalah responsif, yakni supervisor yang peka, tanggap terhadap persoalan-persoalan yang terjadi dilembaga pendidikan, atasan

juga harus bisa memahami kebutuhan masyarakatnya, jangan sampai supervisor menunggu staf-staf menyampaikan keinginan-keinginannya. Supervisor harus bisa menganalisa kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga bisa membuat suatu kebijakan yang strategis guna kepentingan bersama.

5. *Konsensus (consensus Orientation)*

Aspek fundamental untuk cita *good governance* adalah perhatian supervisor dalam melaksanakan tugas-tugasnya adalah pengambilan keputusan secara konsensus, dimana pengambilan keputusan dalam suatu lembaga harus melalui musyawarah dan semaksimal mungkin berdasarkan kesepakatan bersama (pencapaian mufakat). Dalam pengambilan keputusan harus dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak juga dapat menarik komitmen komponen-komponen yang ada di lembaga. Sehingga keputusan itu memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan.

6. *Kesetaraan dan keadilan (Equity)*

Asas kesetaraan dan keadilan ini harus dijunjung tinggi oleh supervisor dan para staf-staf didalam perlakuannya, dimana dalam suatu lembaga pendidikan yang plural baik segi etnik, agama dan budaya akan selalu memicu segala permasalahan yang timbul. Proses pengelolaan supervisor yang baik itu harus memberi peluang, jujur dan adil. Sehingga tidak ada seorangpun atau para staf yang teraniaya dan tidak memperoleh apa yang menjadi haknya.

7. *Efektivitas dan efisien*

Efektivitas dan efisien disini berdaya guna dan berhasil guna, efektivitas diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau besarnya kepentingan berbagai kelompok.

Sedangkan efisien dapat diukur dengan rasionalitas untuk memenuhi kebutuhan yang ada di lembaga. Dimana efektivitas dan efisien dalam proses pendidikan, akan mampu memberikan kualitas yang memuaskan.

8. Akuntabilitas

Asas akuntabilitas berarti pertanggung jawaban supervisor terhadap staf-stafnya, sebab diberikan wewenang dari pemerintah untuk mengurus beberapa urusan dan kepentingan yang ada di lembaga. Setiap supervisor harus mempertanggung jawabkan atas semua kebijakan, perbuatan maupun netralitas sikap-sikap selama bertugas di lembaga.

9. Visi strategi (*strategic vision*)

Asas strategis adalah pandangan-pandangan strategi untuk menghadapi masa yang akan datang, karena perubahan-perubahan yang akan datang mungkin menjadi perangkap bagi supervisor dalam membuat kebijakan-kebijakan. Disinilah diperlukan strategi-strategi jitu untuk menanggapi perubahan yang ada.

METODE PENELITIAN

salah satu jenis penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (*case study*). studi kasus termasuk dalam penelitian analisis deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. kasus yang dimaksud bisa berupa tunggal atau jamak, misalnya berupa individu atau kelompok. disini perlu dilakukan analisis secara tajam terhadap berbagai faktor yang terkait dengan kasus tersebut sehingga akhirnya diperoleh kesimpulan yang akurat (Sutedi, 2009:61). penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu objek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain data dalam

studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber dan hasil penelitian ini hanya berlaku pada kasus yang diselidiki. lebih lanjut Arikunto (1986) mengemukakan bahwa metode studi kasus salah satu jenis pendekatan deskriptif, adalah penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu organisme (individu), lembaga atau gejala tertentu dengan daerah atau subyek yang sempit.

penelitian *case study* atau penelitian lapangan (*field study*) dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang masalah keadaan dan posisi suatu peristiwa yang sedang berlangsung saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya (*given*). subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi atau masyarakat. penelitian *case study* merupakan studi mendalam mengenai unit sosial tertentu dan hasil penelitian tersebut memberikan gambaran luas serta mendalam mengenai unit sosial tertentu. subjek yang diteliti relatif terbatas, namun variabel-variabel dan fokus yang diteliti sangat luas dimensinya (Danim, 2002). menurut Bogdan dan Bikien (1982) studi kasus merupakan pengujian secara rinci terhadap suatu latar atau satu orang subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau satu peristiwa tertentu.

PEMBAHASAN

Partisipasi pemuda sebagai generasi penerus bangsa sangat penting karena ditangan merekalah tongkat estafet kepemimpinan negeri ini, dilibatkannya pemuda dalam memantau dan mengawasi pelayanan publik yang ada di kabupaten cianjur. dari hal yang paling sederhana adalah melaporkan bila ada pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan yang ada dan tidak sesuai dengan Undang-undang No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik ke ombudsman.

Dari hasil wawancara didapat pemuda di cianjur belum banyak terlibat dalam pelayanan publik, ini terlihat dari kurangnya partisipasi pemuda kabupaten cianjur dalam kurun waktu tiga bulan dengan informan sebanyak 107 orang hampir 90 %nya para pemuda dikabupaten cianjur tidak dilibatkan dalam memantau pelayanan publik yaitu sebanyak 94 orang hal ini juga disebabkan oleh karena ada rasa ketakutan para pemuda untuk melaporkan hal yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan adanya ketidaktahuan para pemuda tentang standar pelayanan yang ada sehingga

perlunya sosialisasi terhadap para pemuda dan ketransparansian dalam hal waktu serta biaya dalam kepengurusan surat ataupun yang lainnya berkaitan dengan pelayanan publik harus jelas mengenai waktu serta biaya yang harus dikeluarkan serta belum disosialisasikan kepada para pemuda di kabupaten cianjur.

Dengan mengikut sertakan pemuda adalah salah satu ciri *Good governance* yang mana partisipasi pemuda diperlukan untuk mengawasi dan memantau pelayanan publik yang tidak sesuai dengan Undang-Undang No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan dapat mengatasi beberapa jenis patologi yang mungkin terjadi pada birokrasi bila adanya partisipasi para pemuda terutama di kabupaten cianjur akan dapat meminimalisir beberapa patologi yang melibatkan partisipasi para pemuda sehingga terwujudnya *good governance*.

KESIMPULAN

1. Pemuda di kabupaten cianjur belum banyak dilibatkan dalam bentuk partisipasi dalam pelayanan publik yang ada di kabupaten cianjur hanya 10% nya saja dan bila lebih banyak lagi keterlibatan para pemuda dalam memantau pelayanan publik, maka akan dapat mengontrol perilaku birokrasi dan akan dapat meminimalisir patologi birokrasi yang terjadi sehingga dapat terwujudnya *good governance*.
2. Penegakkan hukum di kabupaten cianjur harus diwujudkan serta transparansi dalam berbagai bidang dalam pelayanan publik, sehingga semua pemuda di masyarakat kabupaten cianjur akan dapat memantau perilaku ataupun pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan serta melaporkannya kepada Ombudsman dan dengan adanya penegakkan hukum, maka ada reward dan punishment yang jelas untuk para birokrat di pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi (1986). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, Bina Aksara Jakarta.
- Bogdan, R.C. dan Biklen, S.K (1982). *Qualitative Research For Educations : An Introduction to Theory and Methods Boston: Allyn and Bacon, Inc.*
- Danim, Sudarman. (2002). *menjadi peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Dede Rosyada (2000), *Buku Panduan Dosen Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Educations): Demokrasi, Hak asasi manusia, dan masyarakat madani*. Jakarta: kencana.
- Echols M John & Hasan Shadily (2002) *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Fasli Djalal & Dedi Supriadi (eds). (2001). *Reformasi Pendidikan dalam konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adi Cita KaryaNusa.
- H.A.R. Tilaar (2009). *Kekuasaan dan Pendiikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Hamirul. *Patologi dalam pelayanan publik karena persepsi dan Gaya Manajerial di kantor pertanahan kota Cimahi*. proceeding seminar nasional II fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poliik Universitas Andalas 28-29 september 2016. ISBN:978-602-71540-6-3
- Peranan Good Governance dalam Mengatasi Penyakit Administrasi Dalam Pelayanan Publik. Jurnal Universitas Putra Indonesia Volume 1 No 2 Edisi Juni 2016, ISSN: 2502-3551.*
- Patologi Birokrasi dalam Pelayanan Publik di Kantor Pertanahan Kota Cimahi : Jurnal Ilmiah Sampurasun Desember 2015: ISSN : 2460-5743.*
- Patologi Birokrasi dalam Pelayanan Publik di kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur (Studi Perilaku Birokrasi). Prosiding Universitas Budi Luhur ISSN:2087-0930, di presentasikan di Jakarta, 30 Juli 2016.*

I Nyoman Sumaryadi (2010), Efektivitas Implementasi Otonomi daerah.

Oakley, Peter (1991), *Project with people: the practice of participation in rural development* Geneva : International Labour Office.